

# ARAHAN PERUNTUKAN RUANG KAWASAN PERKEBUNAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM LAHAN

## Studi Kasus: Kabupaten Lombok Tengah

*(Land Use - Spatial Allocation of Land Plantation Using Land System Approach  
Case Study: Lombok Tengah Regency)*

Maslahatun Nashiha<sup>1</sup>, Turmudi<sup>2</sup> dan Irmadi Nahib<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG

<sup>2</sup> Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama, BIG

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km.46 Cibinong, 16911

E-mail: [maslahatun.nashiha@big.go.id](mailto:maslahatun.nashiha@big.go.id)

Diterima (received): 22 Juli 2015; Direvisi (revised): 2 September 2015; Disetujui untuk dipublikasikan (accepted): 11 Oktober 2015

### ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama di bidang ekonomi pada sektor pertanian adalah rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang ada telah mengakomodir arahan peruntukan kawasan perkebunan, namun belum menunjukkan distribusi lokasi dan jenis komoditas perkebunan yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kesesuaian lahan dari kawasan perkebunan yang telah direncanakan, dan memberikan arahan komoditas yang sesuai berdasarkan kesesuaian lahannya. Metode yang digunakan adalah analisis overlay antarapeta kemampuan lahan dan peta kesesuaian lahan, dengan peta pola ruang, serta metode matching untuk memberikan arahan jenis komoditas perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18,54% dari total luas wilayah dengan peruntukan kawasan perkebunan merupakan lahan yang cocok untuk pertanian (kelas I dan kelas II). Sebagian besar (79,75%) merupakan wilayah yang dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Kawasan yang merupakan lahan prioritas (35,78%) lebih sedikit jika dibandingkan dengan kawasan yang merupakan lahan potensial (44,25%). Selebihnya merupakan lahan alternatif (19,67%). Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di semua kecamatan adalah tembakau dan jambu mete, sedangkan komoditas perkebunan kakao hanya terbatas di satu kecamatan.

**Kata kunci:** peruntukan ruang, kesesuaian dan kemampuan lahan, sistem lahan

### ABSTRACT

One of the main economic problems in agricultural sector is low production and productivity of plantation crops. Spatial Planning document developed by Lombok Tengah District have accommodate plantation area allocation, but have not shown the suitability of location and plantation commodity. This research aimed to analysis land capability and suitability of the plantation area shown in Spatial Planning Map, as well as providing appropriate referrals commodities based on land suitability. This research used overlay and matching method. Parameters considered are land suitability, land capability and spatial pattern. Land suitability and capability information were derived from Land System Map. Land suitability and capability information were overlaid and matched with the spatial pattern to get plantation commodity allocation. The result show 18.54% of total area allocated for plantation area is suitable for agricultural area (class 1 and 2). Most of that (79.75%) is the area which considered for other uses. Priority land plantation is less (35.75%) compared with the plantation area as a potential land (44.25%). The rest is an alternative land (19.67%). Plantation commodities types that can be developed in all districts are tobacco and cashew nut. While the commodities limited for certain district is cocoa.

**Keywords:** spatial allocation, land suitability and capability, land system

### PENDAHULUAN

Analisis fisik dan lingkungan telah banyak digunakan untuk mengenali karakteristik sumber daya alam di suatu wilayah atau kawasan. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan. Tujuannya, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Mengacu pada Permentan No.79 Tahun 2013, dijelaskan bahwa pengertian antara kesesuaian lahan (*land suitability*) berbeda dengan kemampuan lahan (*land capability*). Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu (Arsyad, 1989 dan Sitorus, 1985 dalam Marfai, M.A, 2012). Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

Kemampuan lahan merupakan sifat dasar kesanggupan lahan memberikan hasil untuk penggunaan tertentu secara optimal dan lestari (Putra, C. D., & Mardiatno, D. (2012). Kemampuan lahan lebih menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan secara umum yang dapat diusahakan di suatu wilayah. Kemampuan lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Faktor-faktor ini hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan untuk mendukung suatu tipe penggunaan tertentu (Arsyad, 1989 dalam Sitohang, J. L., et.al, 2013)

Peta sistem lahan dapat dimanfaatkan dalam usaha memahami potensi lahan suatu daerah. Sistem lahan sendiri merupakan satuan-satuan lahan yang berasosiasi secara geomorfologis dan/atau geografis, sehingga membentuk pengulangan. Pola pengulangan sistem lahan bersesuaian dengan proses geologis atau geomorfogenetik yang dapat dikenali, sehingga dalam sistem lahan yang sama memiliki satuan-satuan yang relatif sama. Informasi yang terdapat dalam peta sistem lahan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji dan mengevaluasi peta rencana tata ruang Peta sistem lahan tersebut terlebih dahulu diturunkan menjadi peta operasional yaitu peta kemampuan lahan serta peta kesesuaian lahan (Atmadilaga, H.A, et.al, 2005).

Dalam perekonomian Indonesia sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting karena berperan antara lain sebagai sumber utama pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor ini di Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik, mengingat semakin langkanya atau menurunnya mutu sumberdaya alam (Syukur, 2008).

Sub-sektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian, memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 10% (Bappeda & BPS Provinsi NTB, 2013). Persentase tertinggi lahan perkebunan yang sudah dimanfaatkan di Pulau Lombok terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 38% dari total potensi yang ada. Akan tetapi, salah satu permasalahan utama yang dihadapi di bidang ekonomi untuk urusan pertanian adalah rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Untuk sub-sektor pekebunan dengan luas areal potensial perkebunan sebesar 40.970 ha, luas areal yang digunakan untuk berbagai jenis tanaman perkebunan hanya sebesar 29.152 ha dengan rata-rata produksi sebesar 65% (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2011).

Arahan peruntukan ruang kawasan perkebunan sebagai salah satu peruntukan kawasan budidaya telah diakomodir di dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Akan tetapi, arahan peruntukan kawasan perkebunan tersebut belum menampilkan lokasi serta jenis komoditas perkebunan yang diperuntukkan secara spasial. Arahan yang ada

berupa data tabular silang antara jenis komoditas perkebunan dengan luas perkebunan di masing-masing kecamatan.

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Penataan ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (Batudoka, Z., 2012). Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap arahan peruntukan ruang kawasan perkebunan yang telah ditetapkan juga memerlukan evaluasi.

Penelitian tentang perubahan tutupan/penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang sangat penting, karena perubahan tutupan/penggunaan lahan memiliki dampak terhadap lingkungan fisik dan kesesuaian peruntukan ruang memiliki dampak terhadap peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata ruang (Hidayat, W., et. al, 2015). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, arahan peruntukan ruang yang ada dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan yang merupakan hasil output kajian sebelumnya yang menggunakan sistem lahan sebagai pendekatan utamanya. Peta operasional yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan sistem lahan tersebut adalah peta kesesuaian lahan multisektor dan peta kemampuan lahan multisektor.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kesesuaian lahan dari kawasan perkebunan yang telah direncanakan dalam peta pola ruang menggunakan peta operasional dari peta sistem lahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang, berupa jenis komoditas perkebunan, yang sesuai berdasarkan kesesuaian lahannya menggunakan unit analisis kecamatan.

## METODE

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lingkup fokus penelitian pada kawasan perkebunan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintah. Jenis dan sumber data dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Jenis dan sumber data penelitian.

No.	Jenis Data	Sumber
1.	Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2031 Skala 1:50.000	Pemerintah Daerah
2.	Peta Administrasi Skala 1:50.000	Kabupaten Lombok Tengah
3.	Dok. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031	
4.	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Lombok Tengah Skala 1:25.000	Pusat Pemetaan Integrasi
5.	Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Lombok Tengah Skala 1:25.000	Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG)

Peta kesesuaian lahan dan peta kemampuan lahan yang digunakan merupakan peta output hasil kegiatan Kajian Pemetaan Integrasi Kesesuaian dan Kemampuan Lahan Multisektor. Kajian yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut merupakan rangkaian kegiatan pemaduselarasan interpretasi citra, peta Rupa Bumi Indonesia dan peta sistem lahan RePPPProT (Badan Informasi Geospasial, 2013).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2009 menjabarkan bahwa kemampuan lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas yang ditandai dengan huruf romawi I sampai VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk pertanian, dan dua kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya.

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan merujuk pada FAO (1976), dimana klasifikasinya dapat dibedakan menurut 3 (tiga) kelas. Pertama, Kelas S1 (sangat sesuai), lahan tidak memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat tidak dominan dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan secara nyata. Kelas berikutnya adalah Kelas S2 (cukup sesuai), lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. Kelas berikutnya adalah Kelas S3 (sesuai marginal), lahan mempunyai faktor pembatas yang dominan, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan kepada petani untuk mengatasinya. Kelas yang terakhir adalah kelas N (tidak sesuai), karena mempunyai faktor pembatas yang sangat dominan dan/atau sulit diatasi.

Analisis kemampuan dan lahan dari kawasan perkebunan yang telah direncanakan dalam peta pola ruang dilakukan dengan cara melakukan tumpang susun (*overlay*) antara peta kemampuan lahan dan peta kesesuaian lahan sektor perkebunan. Analisis tumpang susun dilakukan dengan menggunakan software GIS. *Tool* yang digunakan adalah *Intersect Tool*, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan analisis *overlay* pada sejumlah kelas fitur (*feature classes*) dan fitur layer (*feature layer*). Fitur atau bagian dari fitur yang saling berpotongan akan menghasilkan keluaran (*output*) kelas fitur baru. Secara lebih rinci, tahapan penelitian disajikan pada **Gambar 1**.

Data hasil proses *overlay* yang sangat bervariasi disederhanakan dengan menggunakan fitur *Pivot Table* pada software Microsoft Excel. *Pivot Table* merupakan fitur yang mampu menganalisis semua data dalam *worksheet*, sehingga membantu

membuat kesimpulan dari banyak data. *Pivot Table* memudahkan dalam proses meringkas, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data sehingga lebih interaktif, padat informasi, dan dapat dilengkapi dengan *chart*.

*Output* data yang didapatkan dari proses *overlay* tersebut antara lain data klasifikasi kelas kemampuan lahan berdasarkan kelasnya menurut kecamatan dan data klasifikasi kelas kesesuaian lahan komoditas perkebunan menurut kecamatan.

Analisis tumpang susun (*overlay*) juga dilakukan antara peta arahan peruntukan ruang dengan peta kesesuaian lahan menurut komoditasnya. Setelah mendapatkan peta kesesuaian lahan yang baru, kemudian dilakukan analisis *matching* (mencocokkan) yang bersifat subjektif (*subjective matching*) dari data kesesuaian lahan tersebut.

Proses analisis dilakukan secara manual tanpa menggunakan *software*, dikarenakan jenis komoditas yang dievaluasi tidak begitu banyak. Apabila terdapat daerah yang memiliki kelas kesesuaian lahan yang lebih sesuai untuk jenis komoditas perkebunan tertentu maka arahan yang diberikan adalah komoditas tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat daerah yang memiliki kesesuaian lahan yang sama untuk beberapa komoditas, maka arahnya diberikan untuk semua jenis komoditas tersebut. Analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan kecocokan terhadap arahan komoditi perkebunan yang terdapat dalam lampiran perda dengan arahan berdasarkan peta kesesuaian lahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis *overlay* antara peruntukan ruang kawasan perkebunan dengan peta kemampuan lahan disajikan pada **Gambar 2**.

Secara spasial, dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar peruntukan kawasan perkebunan dalam peta rencana masuk ke dalam kelas III – kelas VI. Hanya sebagian kecil saja, wilayah dengan peruntukan ruang sebagai kawasan perkebunan, yang masuk ke dalam dua kelas pertama dan dua kelas terakhir. Kelas kemampuan lahan I – II digambarkan dengan warna hijau, dengan asumsi daerah yang masuk ke dalam dua kelas tersebut merupakan daerah yang cocok untuk pertanian. Kelas kemampuan lahan III, IV, dan VI digambarkan dengan warna jingga, dengan asumsi bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang dapat dimanfaatkan. Sementara Kelas VII dan Kelas VIII digambarkan dengan warna yang berbeda, yaitu merah, dengan asumsi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang tidak dapat dimanfaatkan.

Hasil analisis yang didapatkan dari proses penyederhanaan oleh *crosstab analysis* dapat dilihat pada **Tabel 2**. Hasil menunjukkan bahwa 18,54% dari keseluruhan luas wilayah dengan peruntukan kawasan perkebunan merupakan lahan yang cocok untuk pertanian (kelas I dan kelas II). Hanya 1,68% dari total luas wilayah dengan peruntukan kawasan

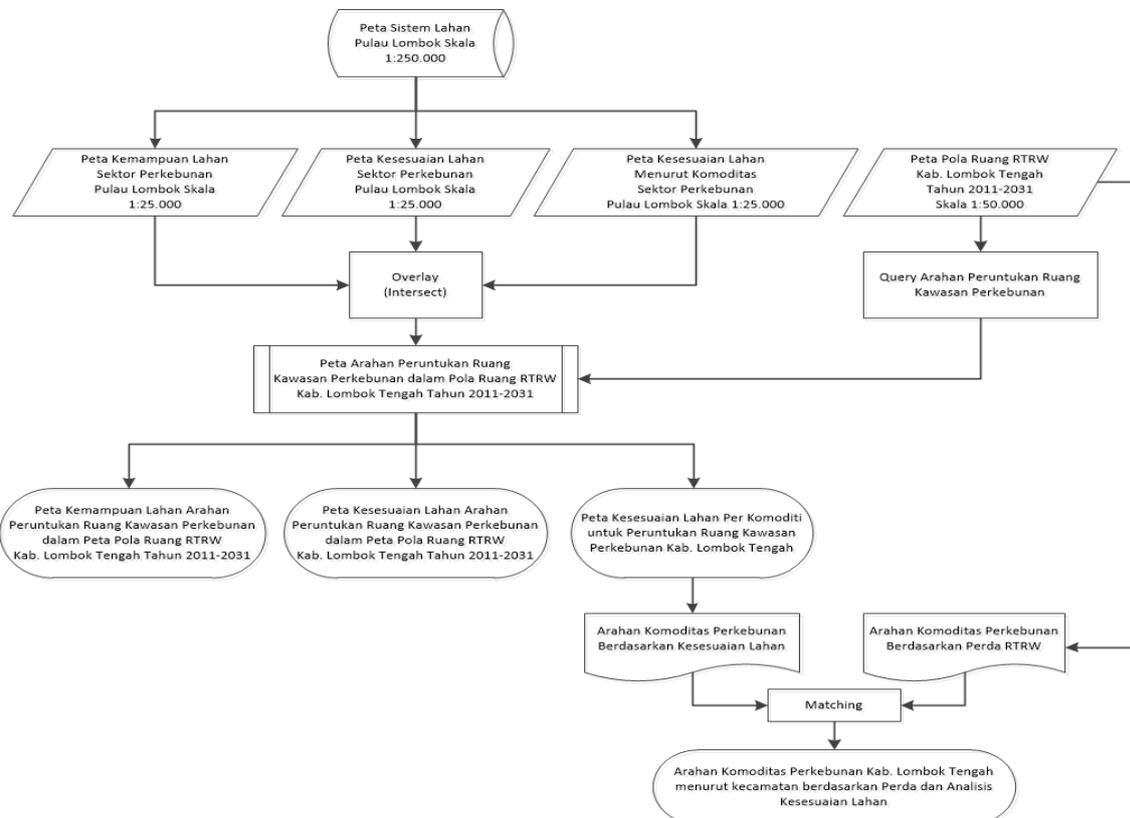
perkebunan merupakan lahan yang harus dilindungi atau lahan untuk konservasi. Sebagian besar (79,76%) peruntukan kawasan perkebunan tersebut merupakan wilayah yang dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan sebagai kawasan perkebunan. Dapat disimpulkan bahwa peruntukan ruang kawasan perkebunan yang terdapat dalam peta rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai jika dibandingkan dengan peta kemampuan lahan yang dibuat oleh Pusat Pemetaan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG).

Berdasarkan hasil analisis juga didapatkan informasi bahwa terdapat 5 jenis faktor penghambat untuk peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain kerikil dan bebatuan (b), drainase (d), kelerengan (l), dan temperatur (t). Hasil analisis menunjukkan bahwa peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar masuk ke dalam kelas VI dengan faktor penghambat kelerengan (l). Peruntukan kawasan perkebunan yang masuk ke dalam kelas VI tersebut berada di Kecamatan Pujut. Dari citra SRTM 90m, yang terdapat dalam **Gambar 2**, terlihat bahwa peruntukan kawasan perkebunan yang berada di Kecamatan Pujut memiliki topografi berbukit. Hal tersebut sesuai jika dibandingkan dengan informasi yang menunjukkan bahwa

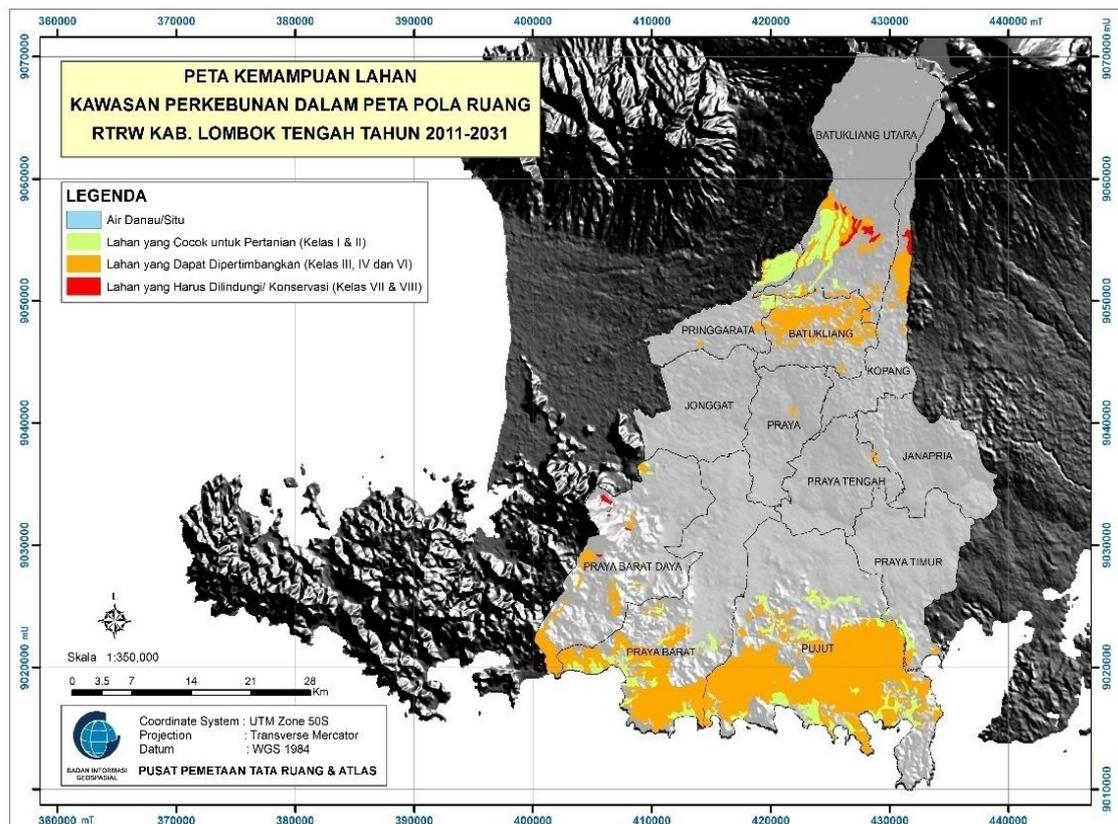
kelerengan menjadi faktor penghambat di daerah tersebut.

Analisis kesesuaian lahan perkebunan dalam penelitian ini merupakan analisis terhadap 6 jenis komoditas perkebunan yaitu tembakau, kopi, kelapa, kakao, jarak pagar, dan jambu mete. Klasifikasi kesesuaian lahan yang terdapat dalam peta kesesuaian lahan multisektor yang dibuat oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT – Badan Informasi Geospasial) ini merupakan hasil analisis lanjutan dari kelas kesesuaian lahan antara masing-masing komoditas perkebunan. Klasifikasi kelas kesesuaian lahan yang merujuk pada FAO (1976) digunakan dalam peta kesesuaian lahan masing-masing komoditas. Sehingga, klasifikasi dalam peta kesesuaian lahan sektor perkebunan tersebut terdiri atas prioritas, potensial, alternatif, dan tidak cocok.

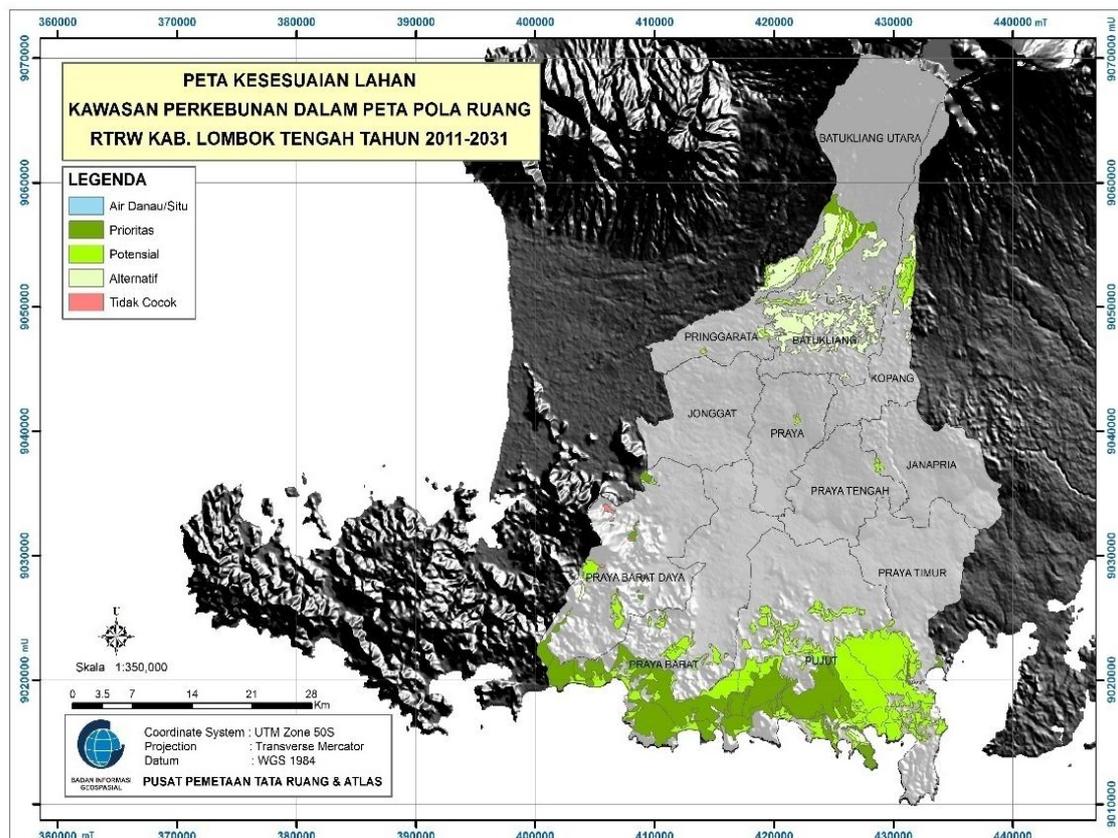
Di dalam peta kesesuaian lahan multisektor ini, apabila terdapat klasifikasi ‘tidak cocok’, bukan berarti lahan tersebut benar-benar tidak cocok untuk dibudidayakan komoditi apapun. Hal yang sama berlaku juga untuk klasifikasi ‘prioritas’, ‘potensial’, dan ‘alternatif’. Jenis komoditas yang cocok untuk lahan tertentu, dapat diketahui melalui analisis selanjutnya dari overlay peta kesesuaian lahan untuk masing-masing komoditas. Hasil analisis tumpang susun antara peruntukan ruang kawasan perkebunan dengan peta kesesuaian lahan disajikan pada **Gambar 3**.



**Gambar 1.** Tahapan penelitian.



Gambar 2. Peta kemampuan lahan peruntukan kawasan perkebunan RTRW Kabupaten Lombok Tengah.



Gambar 3. Peta Kesesuaian Lahan Multisektor Peruntukan Kawasan Perkebunan RTRW Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 2.** Klasifikasi kelas kemampuan lahan peruntukan kawasan perkebunan RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 menurut kecamatan.

Kecamatan	Kemampuan Lahan												Luas (ha)	
	I	II-d	II-l	II-td	III-k	IV-b	IV-k	IV-l	IV-lk	VI-l	VII-l	VIII-t		Air Danau/ Situ
Batukliang	64,07	-	-	-	13,73	-	4,09	-	1.768,73	-	-	-	-	1.850,62
Batukliang Utara	949,42	-	-	-	332,42	388,19	9,04	-	398,3	-	-	216,57	-	2.293,94
Janapria	-	-	-	-	-	-	26,14	-	-	-	-	-	-	26,14
Jonggat	-	0,04	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,06
Kopang	-	-	-	-	-	9,24	361,41	-	177,51	-	-	80,4	-	628,56
Praya	-	0,04	-	-	-	-	29,91	-	0,01	-	-	-	-	29,96
Praya Barat	618,25	0,02	74,00	126,83	20,15	-	-	-	-	3.375,53	-	-	4,65	4.219,43
Praya Barat Daya	2,28	29,69	-	0,33	-	-	320,62	39,74	-	626,24	62,42	-	-	1.081,32
Praya Tengah	-	-	-	-	-	-	20,96	-	-	-	-	-	-	20,96
Praya Timur	-	-	156,55	0,09	0,34	102,69	10,00	-	-	2,74	-	12,64	-	285,05
Pringgarata	629,07	-	-	-	93,65	-	45,51	-	35,26	-	-	-	-	803,49
Pujut	577,14	-	640,75	282,81	257,72	324,73	167,64	165,06	-	8.729,1	-	5,22	0,46	11.150,63
<b>Luas (ha)</b>	<b>2.840,23</b>	<b>29,79</b>	<b>871,3</b>	<b>410,06</b>	<b>718,01</b>	<b>824,85</b>	<b>995,34</b>	<b>204,8</b>	<b>2.379,81</b>	<b>12.733,61</b>	<b>62,42</b>	<b>314,83</b>	<b>5,11</b>	<b>22.390,16</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>18,54</b>						<b>79,76</b>			<b>1,68</b>		<b>0,02</b>	<b>100</b>

Faktor Penghambat: *b*=kerikil dan bebatuan, *d*= drainase, *k*=kedalaman akar, *l*=kelerengan, *t*=temperatur

Berdasarkan persentase perhitungan antara kelas kesesuaian lahan tanaman perkebunan dengan total luas peruntukan kawasan perkebunan seluruhnya, dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja kawasan perkebunan yang memiliki kesesuaian lahan tidak cocok (0,28%). Kawasan perkebunan yang merupakan lahan prioritas (35,78%) lebih sedikit jika dibandingkan dengan kawasan perkebunan yang merupakan lahan potensial (44,25%). Selebihnya merupakan kawasan dengan kesesuaian lahan sebagai lahan alternatif (19,67%).

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peruntukan ruang kawasan perkebunan yang terdapat dalam peta rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai jika dibandingkan dengan peta kesesuaian lahan yang dibuat oleh Pusat Pemetaan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG).

Secara administratif, persentase kawasan perkebunan terhadap luas peruntukan kawasan perkebunan seluruhnya yang memiliki tingkat kesesuaian lahan prioritas (17,49%) dan potensial (31,56%) tertinggi berada di Kecamatan Pujut. Peruntukan kawasan perkebunan yang memiliki klasifikasi kesesuaian lahan tidak cocok berada di Kecamatan Praya Barat Daya. Kawasan perkebunan yang memiliki kesesuaian lahan potensial tersebar merata diseluruh kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peruntukan kawasan perkebunan memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan, namun terdapat faktor penghambat yang harus dikendalikan.

Secara lebih terperinci, keterangan mengenai klasifikasi kelas kesesuaian lahan dari peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah

berdasarkan administrasi kecamatan disajikan melalui **Tabel 3**.

Untuk mendapatkan arahan pemanfaatan ruang rencana yang telah disusun digunakan analisis *matching* (mencocokkan). Melalui analisis *matching* dapat diketahui jenis komoditas yang cocok untuk lahan tertentu disertai klasifikasi kelas kesesuaian lahannya. Pasal 26 ayat 4 dalam Perda No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, menyebutkan bahwa kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan dengan tanaman unggulan kelapa, kopi, jambu mete, jarak pagar, serta tembakau. Kelima jenis komoditas yang disebutkan dalam substansi Perda tersebut dapat dianalisis menggunakan peta kesesuaian lahan yang dibuat oleh BIG.

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan dapat dibedakan menurut tingkatannya. Kelas pertama adalah kesesuaian lahan Kelas S1 (sangat sesuai), lahan tidak memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat tidak dominan dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan secara nyata. Kelas S2 (cukup sesuai), lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (*input*). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. Kelas berikutnya adalah Kelas S3 (sesuai *marginal*), lahan mempunyai faktor pembatas yang dominan, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak dari pada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan kepada petani untuk mengatasinya. Kelas yang terakhir adalah kelas N

(tidak sesuai), karena mempunyai faktor pembatas yang sangat dominan dan/atau sulit diatasi. Hasil analisis *overlay* untuk mendapat arahan peruntukan

ruang tersebut secara spasial disajikan melalui **Gambar 4** dan dideskripsikan pada **Tabel 4a** dan **Tabel 4b**.

**Tabel 3.** Klasifikasi kelas kesesuaian lahan peruntukan kawasan perkebunan RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 menurut kecamatan.

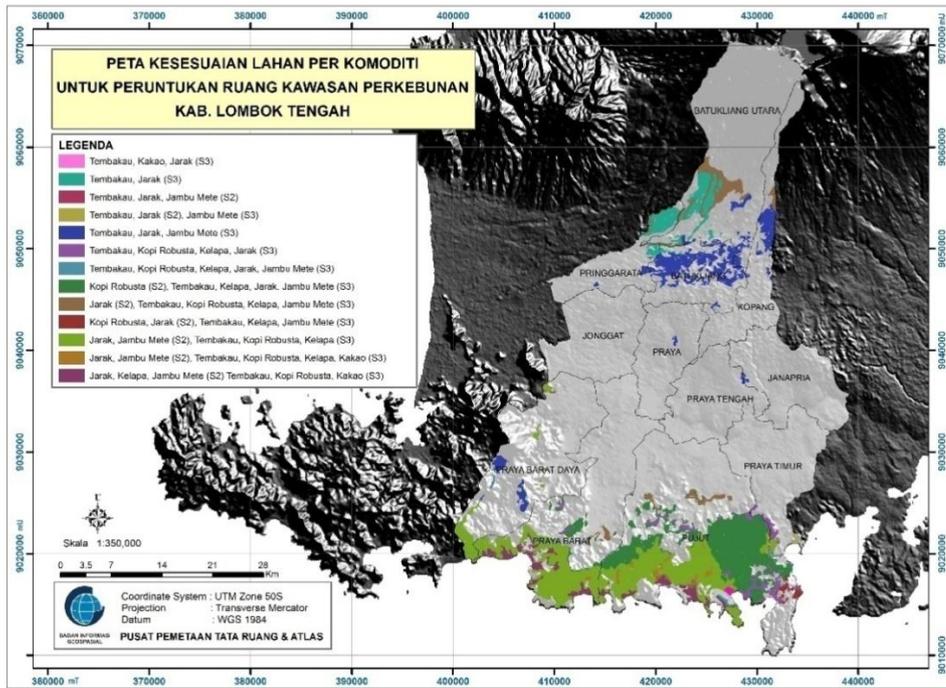
Kecamatan	Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan					Luas (ha)
	Prioritas	Potensial	Alternatif	Tidak Cocok	Air Danau/ Situ	
Batukliang	-	17,82	1.832,80	-	-	1.850,62
Batukliang Utara	388,19	474,47	1.431,28	-	-	2.293,94
Janapria	-	26,14	-	-	-	26,14
Jonggat	-	0,06	-	-	-	0,06
Kopang	9,24	361,41	257,91	-	-	628,56
Praya	-	29,95	0,01	-	-	29,96
Praya Barat	3.038,99	1.175,79	-	-	4,65	4.219,43
Praya Barat Daya	626,24	352,92	39,74	62,42	-	1.081,32
Praya Tengah	-	20,96	0,00	-	-	20,96
Praya Timur	33,11	241,94	10,00	-	-	285,05
Pringgarata	-	139,16	664,34	-	-	803,5
Pujut	3.916,35	7.066,19	167,64	-	0,46	11.150,64
<b>Luas (ha)</b>	<b>8.012,12</b>	<b>9.906,81</b>	<b>4.403,72</b>	<b>62,42</b>	<b>5,11</b>	<b>22.390,18</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>35,78</b>	<b>44,25</b>	<b>19,67</b>	<b>0,28</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>

**Tabel 4b** menunjukkan bahwa tidak terdapat daerah yang memiliki kesesuaian lahan kelas 1 atau daerah yang sangat sesuai (S1) untuk ditanami jenis komoditas perkebunan tertentu. Secara umum, dilihat dari luas kesesuaian lahannya, kawasan perkebunan pada RTRW Kabupaten Lombok Tengah memiliki kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) untuk komoditas perkebunan jarak dan jambu mete, serta sesuai marginal (S3) untuk komoditas tembakau, kopi robusta, dan kelapa. Sebagian besar kawasan perkebunan yang memiliki kesesuaian lahan tersebut terletak di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat, sebagian kecil lainnya terletak di Kecamatan Praya Barat Daya dan Kecamatan Praya Barat Timur. Hasil analisis tersebut, maka arahan untuk komoditas perkebunan di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya adalah perkebunan jarak dan jambu mete.

Dalam Lampiran II.9 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2011), terdapat rincian dan lokasi peruntukan sektor pertanian dan sektor perkebunan. Penggunaan lahan untuk sektor perkebunan antara lain adalah kelapa, kopi, jambu mete, jarak, tembakau, dan lain-lain (kakao, kemiri, pinang, vanili, kapuk, lada, aren, dan asam). Arahan jenis komoditas tersebut berbeda dengan substansi yang disebutkan di dalam batang tubuh Perda. Untuk dapat lebih mudah memahaminya, arahan jenis komoditas dan distribusi kecamatannya dapat dilihat pada **Tabel 5** kolom P.

Pada tabel tersebut didapatkan informasi bahwa komoditas kelapa, tembakau dan komoditas lain-lain dapat dibudidayakan di semua kecamatan. Sementara tanaman kopi sangat terbatas hanya di tiga kecamatan saja, yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, dan Kopang. Komoditas perkebunan jambu mete dan jarak tersebar di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Pujut. Hasil analisis *matching* (mencocokkan) secara manual menggunakan data hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada **Tabel 5** kolom A.

Tahapan selanjutnya adalah membandingkan antara arahan yang terdapat dalam Perda dengan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kawasan perkebunan yang berbeda dengan arahan yang telah direncanakan. Sebagai contoh, komoditas perkebunan kopi robusta terdapat perbedaan antara lokasi yang direncanakan dengan lokasi yang sesuai. Dalam peta rencana, lokasi perkebunan kopi hanya diarahkan di Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, dan Kecamatan Kopang. Namun, dari hasil analisis arahan yang dibuat, diketahui bahwa kecamatan lain, kecuali Kecamatan Janapria, memiliki potensi kesesuaian lahan untuk perkebunan kopi.



**Gambar 4.** Peta kesesuaian lahan menurut komoditas untuk peruntukan ruang kawasan perkebunan Kabupaten Lombok Tengah

**Tabel 4a.** Kesesuaian lahan per komoditas pada peruntukan ruang kawasan perkebunan RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 menurut kecamatan.

Kecamatan	Luas (ha)							
	Tembakau (S3)	Kakao (S3)	Jarak (S3)	Tembakau, Jarak (S3)	Tembakau, Jarak, Jambu Mete (S2)	Tembakau, Jarak (S2), Jambu Mete (S3)	Tembakau, Jarak, Jambu Mete (S3)	Tembakau, Kopi Robusta, Kelapa, Jarak (S3)
Batukliang	-	-	-	64,07	-	-	1.772,82	-
Batukliang Utara	-	-	-	949,42	-	-	407,34	-
Janapria	-	-	-	-	-	-	26,14	-
Jonggat	-	-	-	-	-	-	0,02	-
Kopang	-	-	-	-	-	-	538,92	-
Praya	-	-	-	-	-	-	29,92	-
Praya Barat	-	-	-	-	-	-	-	74,00
Praya Barat Daya	-	62,42	-	-	-	-	320,62	-
Praya Tengah	-	-	-	-	-	-	20,96	-
Praya Timur	0,34	-	-	10,00	12,64	32,40	-	156,55
Pringgarata	-	-	-	629,08	-	-	80,77	-
Pujut	50,05	-	101,17	66,47	5,22	-	-	695,55
<b>Total</b>	<b>50,39</b>	<b>62,42</b>	<b>101,17</b>	<b>1.719,04</b>	<b>17,86</b>	<b>32,40</b>	<b>3.197,51</b>	<b>926,10</b>

Sementara untuk komoditas tembakau, hasil perbandingan menunjukkan bahwa arahan distribusi komoditas tersebut sudah sesuai antara yang direncanakan dengan arahan kesesuaian lahan yang dihasilkan dalam analisis.

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Pujut terdapat beberapa lokasi yang memiliki kesesuaian lahan cukup

sesuai untuk semua komoditas perkebunan. Artinya, kecamatan tersebut dapat diarahkan sebagai kecamatan dengan sektor perkebunan sebagai sektor utama pembangunan daerahnya. Sama halnya seperti sektor pertanian, sektor perkebunan memiliki *multiplier effect* terhadap sektor lainnya.

**Tabel 4b.** Kesesuaian lahan per komoditas pada peruntukan ruang kawasan perkebunan RTRW Kab. Lombok Tengah Tahun 2011-2031 menurut kecamatan.

Kecamatan	Luas (ha)						
	Tembakau, Kopi Robusta, Kelapa, Jarak, Jambu Mete (S3)	Kopi Robusta (S2), Tembakau, Kelapa, Jarak, Jambu Mete (S3)	Jarak (S2), Tembakau, Kopi Robusta, Kelapa, Jambu Mete (S3)	Kopi Robusta, Jarak (S2), Tembakau, Kelapa, Jambu Mete (S3)	Jarak, Jambu Mete (S2), Tembakau, Kopi Robusta, Kelapa (S3)	Jarak, Jambu Mete (S2), Tembakau, Kopi Robusta, Kelapa, Kakao (S3)	Jarak, Kelapa, Jambu Mete (S2), Tembakau, Kopi Robusta, Kakao (S3)
Batukliang	-	-	13,73	-	-	-	-
Batukliang Utara	-	-	937,18	-	-	-	-
Janapria	-	-	-	-	-	-	-
Jonggat	-	-	0,04	-	-	-	-
Kopang	-	-	89,64	-	-	-	-
Praya	-	-	0,04	-	-	-	-
Praya Barat	-	356,69	126,85	-	3.018,84	20,15	618,25
Praya Barat Daya	39,74	-	30,02	-	626,24	-	2,28
Praya Tengah	-	-	0,00	-	-	-	-
Praya Timur	-	2,03	0,09	0,71	70,29	-	-
Pringgarata	-	-	93,65	-	-	-	-
Pujut	-	5.113,90	376,28	165,06	3.939,94	207,67	428,87
<b>Total</b>	<b>39,74</b>	<b>5.472,62</b>	<b>1.667,52</b>	<b>165,77</b>	<b>7.655,31</b>	<b>227,82</b>	<b>1.049,40</b>

**Tabel 5.** Arahan komoditas perkebunan menurut kecamatan berdasarkan perda dan hasil analisis.

Kecamatan	Arahan Peruntukan Ruang												
	Kelapa		Kopi		Jambu Mete		Jarak		Tembakau		Lain-lain (Kakao, dsb)		Kakao
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	A
Batukliang	v	*	v	*	-	*	v	*	v	*	v	-	-
Batukliang Utara	v	*	v	*	-	*	v	*	v	*	v	-	-
Janapria	v	-	-	-	v	*	-	*	v	*	v	-	-
Jonggat	v	*	-	*	-	*	*	*	v	*	v	-	-
Kopang	v	*	v	*	-	*	-	*	v	*	v	-	-
Praya	v	*	-	*	-	*	*	*	v	*	v	-	-
Praya Barat	v	*	-	*	*	*	*	*	v	*	v	*	*
Praya Barat Daya	v	*	-	*	*	*	*	*	v	*	v	*	*
Praya Tengah	v	*	-	*	-	*	-	*	v	*	v	-	-
Praya Timur	v	*	-	*	*	*	-	*	v	*	v	-	-
Pringgarata	v	*	-	*	-	*	-	*	v	*	v	-	-
Pujut	v	*	-	*	*	*	*	*	v	*	v	*	*

Keterangan :

**P (Lampiran Perda)**

v = penggunaan lahan

**A = Hasil Analisis**

v = semua lokasi memiliki kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal)

\* = terdapat beberapa lokasi yang memiliki kesesuaian lahan S2 (cukup sesuai)

Sebagai contoh sektor perdagangan dan jasa maupun sektor industri. Sehingga suatu lokasi dapat diarahkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa maupun kawasan industri yang lokasinya tidak jauh dari kawasan perkebunan tersebut.

Arahan jenis komoditas perkebunan berdasarkan kesesuaian lahannya diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan keuntungan

maksimal pada nilai hasil produksi perkebunan, dibandingkan hanya memberikan arahan peruntukan kawasan tanpa memberikan arahan jenis komoditas yang sesuai. Hasil analisis yang telah dibuat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meninjau ulang rencana yang telah disusun sebelumnya.

## KESIMPULAN

Hasil analisis peruntukan ruang kawasan perkebunan yang terdapat dalam peta rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai jika dibandingkan dengan peta kesesuaian dan kemampuan lahan yang dibuat oleh Pusat Pemetaan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG).

Perbedaan hasil antara arahan pemanfaatan lahan antara lahan yang sudah di Perdakan dengan hasil analisis, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaharui (update) RTRW pada periode selanjutnya

Penelitian ini terbatas hanya menganalisis sektor perkebunan saja. Akan lebih baik jika peta kesesuaian lahan multisektor yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan tidak hanya pada sektor perkebunan, namun juga untuk sektor pertanian dan perikanan. Peta kemampuan lahan dan peta kesesuaian lahan skala 1:25.000 yang merupakan peta turunan dari peta sistem lahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun atau mereview peta pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah yang telah dibuat. Pendetailan peta sistem lahan dari skala 1:250.000 menjadi skala 1:25.000 mutlak diperlukan terutama untuk penyusunan/review rencana tata ruang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, dan Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang atas kesempatan menuliskan kegiatan evaluasi ini menjadi sebuah karya tulis

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadilaga, H. Agus, A. Rusmanto, Nurwadjadi, dkk. (2005). *Spesifikasi Teknis Pemutakhiran Data Sistem Lahan*. Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Cibinong.
- Badan Informasi Geospasial. (2013). *Laporan Akhir Kegiatan Pemetaan Integrasi Kesesuaian dan Kemampuan Lahan Multisektor*. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Cibinong.
- Bappeda & Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2013). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2014*. CV. Harapan Mandiri Utama. Mataram.

- Batudoka, Z. (2012). Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli. *SMARTek*, 3(4).
- FAO. (1976). A Framework for Land Evaluation. *FAO Soil Bulletin* 32.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(2), 130-146.
- Marfai, M. A., & Cahyadi, A. (2012). Kajian Kesesuaian Lahan Untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua). *Bumi Lestari*, 12(2).
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2011). *RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2015*. Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Praya.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7. Bupati Lombok Tengah. Praya.
- Putra, C. D., & Mardiatno, D. (2012). Kemampuan Lahan Untuk Arahan Kawasan Budidaya dan Non Budidaya Sub Daerah Aliran Sungai Petir di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(2).
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No -. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No -. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, No 1041. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Sitohang, J. L., Sitorus, S., & Sembiring, M. (2013). Evaluasi Kemampuan Lahan Desa Sihiong, Sinar Sabungan dan Lumbun Lobu Kabupaten Toba Samosir. *Agroekoteknologi*, 1(3).
- Syukur, S. (2008). Analisis Kesesuaian Lahan di Kec. Witaponda dan Bumi Raya, Kab. Morowali untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Agroland* 15(1): 45-50.